SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan mengenai izin mendirikan bangunan telah diubah dalam Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menggantinya dengan persetujuan bangunan gedung;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung di daerah diperlukan dasar hukum yang mengatur hal tersebut sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Repubik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaen Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
15. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bandung.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara

lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bungan dan/atau denda.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundan-undangan retribusi daerah.
24. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
26. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:
   a. Retribusi PBG; dan
   b. Retribusi Izin Trayek.
(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Judul Bagian Kedua Bab II dan judul Paragraf 1 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Paragraf 1
Nama, Obyek dan Subyek
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Obyek Retribusi PBG adalah penerbitan PBG dan SLF.
(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
   b. penerbitan PBG;
   c. penatausahaan;
   d. inspeksi bangunan gedung;
   e. penerbitan SLF dan SBKBG; dan
   f. pencetakan plakat SLF.
(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
   a. pembangunan baru;
   b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; atau
   c. PBG perubahan untuk:
      1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
      2. perubahan lapis Bangunan Gedung;

3. perubahan luas Bangunan Gedung;
4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

(4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.

(5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang–pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF

(2) Wajib Retribusi PBG adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG

7. Judul Paragraf 2 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
Persetujuan Bangunan Gedung

8. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Tingkat pengunaan jasa pada Retribusi PBG diukur berdasarkan tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.

(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

(3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung;atau
   b. Harga satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas merupakan formula untuk:
   a. Bangunan Gedung; dan
   b. Prasarana Bangunan Gedung.

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
   a. Luas Total Lantai;
   b. Indeks Terintegrasi; dan
   c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
   a. Volume;
   b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
   c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

9. Judul Paragraf 3 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

10. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.

(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penerbitan dokumen PBG, SLF;
   b. inspeksi Penilik bangunan;
   c. penegakan hukum;
   d. penatausahaan; dan
   e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

11. Judul Paragraf 4 Bagian Kedua Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

12. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan perjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$It \quad : If \times \sum (bp \times lp) \times$$

(3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT: (3/50/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina**

**NIP. 196901011999012001**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Karena itu, Penyelenggaraan Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan Masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjatidiri, serta seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Bangunan Gedung. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung sebagai pengaturan lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung setragaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja, baik dalam pemenuhan persyaratan yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maupun dalam pemenuhan tertib Penyelenggaraan Bangunan Gedung, serta dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung di daerah diperlukan dasar hukum yang mengatur hal tersebut sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib,baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud Bangunan Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin kcselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 4

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 5

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 7

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Pasal 8

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 74

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG

| NO | KOMPONEN BIAYA | PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI |
|---|---|---|
| 1 | Biaya pembinaan penyelenggaraan Bangunan Gedung | |
| | a. Bangunan Gedung | |
| | 1) Pembangunan Bangunan Gedung baru | Nilai Retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg<br>LLt : ∑ (LLi + LBi)<br>It :If x ∑ (bp x lp) x Fm |
| | 2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan | |
| | a) Rusak Sedang | LLt x (Ilo x SHST) x It x 0,225 |
| | b) Rusak Berat | LLt x (Ilo x SHST) x It x 0,325 |
| | 3) Pelestarian/pemugaran | |
| | a) Pratama | LLt x (Ilo x SHST) x It x 0,325 |
| | b) Madya | LLt x (Ilo x SHST) x It x 0,225 |
| | c) Utama | LLt x (Ilo x SHST) x It x 0,150 |
| | b. Prasarana Bangunan Gedung | |
| | 1) Pembangunan baru | V x I x lbg x HS Retribusi (HSpbg) |
| | 2) Rehabilitasi | |
| | a) Rusak sedang | V x I x 0,225 x HS Retribusi (HSpbg) |
| | b) Rusak Berat | V x I x 0,325 x HS Retribusi (HSpbg) |
| 2 | Biaya administrasi PBG | |
| | Retribusi Terutang | = 1+2 |

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2021 dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara). SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk **Bangunan Gedung negara sederhana** yang telah detetapkan oleh Pemda dan nilai tersebut dapat langsung digunakan sebagai SHST.

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST dengan ditetapkan sebesar 0,5 %
It : Indeks Terintegrasi
Ibg : Indeks BG Terbangun
Lli : Luas Lantai ke-i
LBi : Luas Basemen ke-i
If : Indeks Fungsi
bp : bobot parameter
Ip : Indeks parameter
Fm : Faktor kepemilikan

II. TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN GEDUNG

1. Tabel Indeks Terintegritas

| **Fungsi** | **Indeks Fungsi (If)** | **Klasifikasi** | **Bobot Parameter (bp)** | **parameter** | **Indeks Parameter (Ip)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Usaha | **0,7** | Kompleksitas | **0,3** | a. Sederhana<br>b. Tidak sederhana | **1**<br>**2** |
| Usaha (UMKM-Prototipe) | **0,5** | Permanensi | **0,2** | a. Non Permanen<br>b. Permanen | **1**<br>**2** |
| Hunian<br>a.<100 $m^2$ dan < 2 lantai | **0,15** | Ketinggian | **0,5** | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai |
| b. >100 $m^2$ dan > 2 lantai | **0,17** | | | | |
| Keagamaan | **0** | | | | |
| Fungsi Kusus | **1** | | | | |
| Sosial Budaya | **0,3** | Faktor Kepemilikan (Fm)<br>a. Negara : **0**<br>b. Perorangan/Badan Usaha : **1** | | | |
| Ganda/Campuran<br>a.Luas <500 $m^2$ dan <2 lantai | **0,6** | | | | |
| b. Luas >500 $m^2$ dan >2 lantai | **0,8** | | | | |

**2. Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)**

| **Jenis Pembangunan** | **Indeks BG Terbangun** |
|---|---|
| Bangunan Gedung Baru | 1 |
| Rehabilitas/Renovasi BG | 0.45 x 50% = 0,225 |

| Jenis Pembangunan | Indeks BG Terbangun |
|---|---|
| a. Sedang<br>b. Berat | 0,65 x 50% = 0,325 |
| Pelestarian/Pemugaran<br>a. Pratama<br>b. Madya<br>c. Utama | <br>0,65 x 50% = 0,325<br>0.45 x 50% = 0,225<br>0.30 x 50% = 0,150 |

**3. Tabel. Koefisien Jumlah Lantai**

| Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai | Jumlah Lantai | Koefisien Jumlah Lantai |
|---|---|---|---|
| Basemen 3 lapis + (n) | 1,393 + 0,1 (n) | 31 | 1,686 |
| Basemen 3 lapis | 1,393 | 32 | 1,695 |
| Basemen 2 lapis | 1,299 | 33 | 1,704 |
| Basemen 1 lapis | 1,197 | 34 | 1,713 |
| 1 | 1 | 35 | 1,722 |
| 2 | 1,090 | 36 | 1,730 |
| 3 | 1,120 | 37 | 1,738 |
| 4 | 1,135 | 38 | 1,746 |
| 5 | 1,162 | 39 | 1,754 |
| 6 | 1,197 | 40 | 1,761 |
| 7 | 1,236 | 41 | 1,768 |
| 8 | 1,265 | 42 | 1,775 |
| 9 | 1,299 | 43 | 1,782 |
| 10 | 1,333 | 44 | 1,789 |
| 11 | 1,364 | 45 | 1,795 |
| 12 | 1,393 | 46 | 1,801 |
| 13 | 1,420 | 47 | 1,807 |
| 14 | 1,445 | 48 | 1,813 |
| 15 | 1,468 | 49 | 1,818 |
| 16 | 1,489 | 50 | 1,823 |
| 17 | 1,508 | 51 | 1,828 |
| 18 | 1,525 | 52 | 1,833 |
| 19 | 1,541 | 53 | 1,837 |
| 20 | 1,556 | 54 | 1,841 |
| 21 | 1,570 | 55 | 1,845 |
| 22 | 1,584 | 56 | 1,849 |
| 23 | 1,579 | 57 | 1,853 |
| 24 | 1,610 | 58 | 1,856 |
| 25 | 1,622 | 59 | 1,859 |
| 26 | 1,634 | 60 | 1,862 |
| 27 | 1,645 | 60+(n) | 1,862+0,003 (n) |
| 28 | 1,656 | | |
| 29 | 1,666 | | |
| 30 | 1,676 | | |

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;

- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya,
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG = $\frac{\left(\sum(LLi\ x\ KL)\right)+\sum(LBi\ x\ KB))}{(\sum LLi+\sum LBi)}$

LLi : Luas Lantai ke-i
KL : Koefisien jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
Kbi : Koefisien jumlah lapis

III. TABEL HARGA SATUAN RETRIBUSI PBG UNTUK BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

| No. | JENIS BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| **1000** | **Bangunan Gedung** | | **HSBGN x 0,5 %** |
| | | | |
| **2200** | **Prasarana Bangunan Gedung** | | |
| **2210** | **Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman** | | |
| 2211 | Pagar tembok / benteng | m1 | **7.000** |
| 2212 | Tanggul/retaining wall | m1 | 1% dari RAB |
| 2213 | Turap batas kavling/persil | m1 | 1% dari RAB |
| 2214 | Pagar tembok/brandmuur | m1 | **1.700** |
| 2215 | Pagar teralis/besi | m1 | **7.000** |
| 2216 | TPT (Tembok Penahan Tanah) | m1 | **8.700** |
| **2220** | **Konstruksi penanda masuk lokasi** | | |
| 2221 | Gapura | m2 atau unit standar | 1% dari RAB |
| 2222 | Gerbang | | |
| **2230** | **Konstruksi perkerasan** | | |
| 2231 | Jalan beton/aspal | m2 | **2.600** |
| 2232 | Lapangan parkir | m2 | 1% dari RAB |
| 2233 | Lapangan upacara | | |
| 2234 | Lapangan olah raga terbuka | | |
| 2235 | Rabat/Lantai terbuka/Brandmuur | m2 | **800** |
| 2236 | Jalan tanah/koral | m2 | **800** |
| 2237 | Aspahl /Concreat Mixing Plant | m2 | **2.600** |
| 2238 | Grassblock | m2 | 1% dari RAB |
| 2240 | **Konstruksi penghubung** | | |
| 2241 | Jembatan | m2 atau unit standar | 1% dari RAB |
| 2242 | jembatan antar gedung | | |
| 2243 | jembatan penyebrangan orang/barang | | |
| 2244 | jembatan bawah | | |

| No. | JENIS BANGUNAN | SATUAN | HARGA SATUAN RETRIBUSI (Rp) |
|---|---|---|---|
| | tanah/underpass | | |
| 2245 | Box culvert | | |
| 2246 | Selokan/Grepel | m1 | **1.300** |
| **2250** | **Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah** | | |
| 2251 | Kolam/Kolam renang | m2 | **6.100** |
| 2252 | Kolam pengolahan air | m3 | **6.100** |
| 2253 | Reservoir air bawah tanah | m2 | 1% dari RAB |
| 2254 | Septictank | m2 | **5.200** |
| 2255 | Sumur Resapan | m2 | **5.200** |
| 2256 | Tanki Air (menara air) | m2 | **8.700** |
| 2257 | Gorong - gorong ukuran dia <50 | m1 | **2.600** |
| 2258 | Gorong - gorong ukuran dia >50 cm | m1 | **5.200** |
| 2259 | Tangki tanam bahan bakar | unit dan pertambahannya | 1% dari RAB |
| 2260 | **Konstruksi menara** | | |
| 2261 | Menara antena/tower telekomunikasi | unit dan pertambahannya | 1,75 % dari RAB |
| 2262 | Menara reservoir | | 1% dari RAB |
| 2263 | Cerobong | | |
| 2264 | Silo/Boiler | | |
| **2270** | **Konstruksi monumen** | | |
| 2271 | Tugu | unit dan pertambahannya | 1% dari RAB |
| 2272 | Patung | | |
| **2280** | **Konstruksi instalasi / gardu** | | |
| 2281 | Instalasi listrik | unit dan pertambahannya | 1% dari RAB |
| 2282 | Instalasi telepon / komunikasi | | |
| 2283 | Instalasi pengolahan | | |
| **2290** | **Konstruksi reklame/papan nama** | | |
| 2291 | Billboard | unit dan pertambahannya | 1% dari RAB |
| 2292 | Papan iklan | | |
| 2293 | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | | |

Catatan :

1. Untuk Bangunan Gedung 1 lantai yang mempunyai ketinggian lebih dari 4 M dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari retribusi Bangunan Gedung
2. Bangunan Gedung dan bangunan bukan gedung/prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 1-1,75 %

IV. TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PBG UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

| No | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | Indeks PEMBANGUNAN BARU | Indeks RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | Indeks RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman | Pagar | m1 | 1,00 | 0,65 x50% | O,45 x50% |
| | | Tanggul/ retaining wall | m1 | 1,00 | | |
| | | Turap batas kaveling/persil | m1 | 1,00 | | |
| 2 | Konstruksi penanda masuk lokasi | Gapura | m'2 | 1,00 | | |
| | | Gerbang | m'2 | 1,00 | | |
| 3 | Konstruksi perkerasan | Jalan | m'2 | 1,00 | | |
| | | Lapangan upacara | m'2 | 1,00 | | |
| | | Lapangan olahraga terbuka | m'2 | 1,00 | | |
| 4 | Konstruksi perkerasan aspal, beton | | m'2 | 1,00 | | |
| 5 | Konstruksi perkerasan grassblock | | m'2 | 1,00 | | |
| 6 | Konstruksi penghubung | Jembatan | m'2 | 1,00 | | |
| | | Box culvert | | 1,00 | | |
| 7 | Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung) | | m'2 | 1,00 | | |
| 8 | Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang) | | m'2 | 1,00 | | |
| 9 | Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass | | m'2 | 1,00 | | |
| 10 | Konstruksi kolam/ reservoir | Kolam renang | m'2 | 1,00 | | |
| | | Kolam pengolahan air reservoir di bawah | m'2 | 1,00 | | |

| No | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | Indeks PEMBANGUNAN BARU | Indeks RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | Indeks RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | bawah tanah | tanah | | | | |
| 11 | Konstruksi septic tank, sumur resapan | | m'2 | 1,00 | | |
| 12 | Konstruksi menara | Menara reservoir | Per 5 m2 | 1,00 | | |
| | | Cerobong | Per 5 m2 | 1,00 | | |
| 13 | Konstruksi menara air | | Per 5 m2 | 1,00 | | |
| 14 | Konstruksi monumen | Tugu | Unit | 1,00 | | |
| | | Patung | Unit | 1,00 | | |
| | | Di dalam persil | Unit | 1,00 | | |
| | | Di luar persil | Unit | 1,00 | | |
| 15 | Konstruksi instalasi/ gardu listrik | Instalasi listrik | Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2 | 1,00 | | |
| | | Instalasi telepon/komunikasi | Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan per m2 | 1,00 | | |
| | | Instalasi pengolahan | Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan | 1,00 | | |

| No | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | Indeks PEMBANGUNAN BARU | Indeks RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | Indeks RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | per m2 | | | |
| 16 | Konstruksi reklame / papan nama | Billboard papan iklan | Unit dan penambahannya | 1,00 | | |
| | | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | Unit dan penambahannya | 1,00 | | |
| 17 | Fondasi mesin (diluar bangunan) | | Unit mesin | 1,00 | | |
| 18 | Konstruksi menara televisi | | Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya) | 1,00 | | |
| 19 | Konstruksi antena radio | | | | | |
| | 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki: | | | | | |
| | | Ketinggian 25-50 m | | 1,00 | | |
| | | Ketinggian 51-75 m | | 1,00 | | |
| | | Ketinggian 76-100 m | | 1,00 | | |
| | | Ketinggian 101-125 m | | 1,00 | | |
| | | Ketinggian 126-150 m | | 1,00 | | |
| | | Ketinggian diatas 150 m | | 1,00 | | |
| | 2l Sistem guy wire/ bentang kawat: | | | | | |
| | | Ketinggian 0-50 m | | 1,00 | | |
| | | Ketinggian 51-75 m | | 1,00 | | |
| | | Ketinggian 76-100 m | | 1,00 | | |
| | | Ketinggian diatas 100 m | | 1,00 | | |
| 20 | Konstruksi antena (tower telekomunikasi) | Menara bersama | | | | |
| | | a) Ketinggian kurang dari 25 m | unit | 1,00 | | |
| | | b) Ketinggian 25-50 m | unit | 1,00 | | |
| | | c) Ketinggian diatas 50 m | unit | 1,00 | | |
| | | Menara mandiri | | | | |
| | | a) Ketinggian kurang dari 25 m | unit | 1,00 | | |
| | | b) Ketinggian 25-50 m | unit | 1,00 | | |

| No | JENIS PRASARANA | BANGUNAN | SATUAN | Indeks PEMBANGUNAN BARU | Indeks RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG | Indeks RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | c) Ketinggian diatas 50 m | unit | 1,00 | | |
| 21 | Tangki tanam bahan bakar | | | 1,00 | | |
| 22 | Pekerjaan drainase (dalam persil) | 1) Saluran | m1 | 1,00 | | |
| | | 2) Kolam tampung | rn'2 | 1,00 | | |
| 23 | Konstruksi penyimpanan/ silo | | m3 | 1,00 | | |

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA